

# ***ACTION PLAN* SEBAGAI ALAT KETERPADUAN DALAM PENATAAN PERMUKIMAN NELAYAN DI KELURAHAN PONJALE KOTA PALOPO**

Natser Istiqlal Chalid<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Dosen Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Sulawesi Barat, Jalan Prof. Dr. Baharuddin Lopa, S.H. Talumung, Majene, 91214, Indonesia

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan (1) Menggali permasalahan dipermukiman nelayan, (2) Menganalisis peringkat permasalahan permukiman nelayan, (3) Merumuskan model Action Plan Penataan Permukiman Nelayan. Tantangan mendasar pada perencanaan dan pengelolaan permukiman nelayan adalah untuk memfasilitasi pembangunan dan meminimalkan dampak negatif dari semua kegiatan pembangunan serta bencana alam dalam waktu yang bersamaan. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang selama ini tidak dilaksanakan secara terpadu. Penelitian ini menggunakan Focus Group Discussion (FGD). Saran penelitian ini untuk menciptakan Action Plan penataan permukiman nelayan.

*Kata kunci : Action Plan, Permukiman Nelayan, Palopo*

## **Pendahuluan**

Indonesia merupakan negara kepulauan memiliki kawasan pesisir yang berdampingan dengan kota atau kawasan perkotaan. Kawasan pesisir menjadi tantangan tersendiri karena permasalahan yang terjadi lebih besar dibandingkan dengan kota atau kawasan perkotaan yang terdapat di daratan dan pegunungan. Dampak perubahan iklim menjadi isu penting yang harus diperhatikan diantaranya : permukaan air laut yang kerap mengakibatkan rob di beberapa titik hunian, intrusi air laut yang menyebabkan menurunnya kualitas air bersih, intrusi air laut yang terus mengerus permukaan tanah dan kerap mengakibatkan bencana longsor. Selain itu terdapat isu lingkungan yang terjadi seperti pencemaran, kerusakan fisik habitat, eksploitasi sumber daya secara berlebihan, dan konversi kawasan lindung menjadi kawasan budidaya yang kerap mengancam ekosistem kawasan pesisir. Ekosistem memiliki peran strategis dan prospek yang cerah bagi pembangunan nasional. ekosistem sebagai bagian dari wilayah pesisir, memiliki berbagai sumber daya alam untuk berkembang. Wilayah pesisir pada umumnya memiliki beberapa potensi fisik untuk dikembangkan namun saat ini daerah pesisir terganggu aktivitas manusia yang mengakibatkan akan menurunnya potensi.

Namun saat ini pengembangan sumber daya masih belum optimal dan berkelanjutan. Alasan utamanya adalah bahwa perencanaan dan pelaksanaan berbagai program penataan permukiman di pesisir masih bersifat sektoral. Setiap sektor dilaksanakan tanpa mengingat sektor terkait lainnya. Hal ini terjadi konflik kepentingan antar sektor yang terlibat dalam pelaksanaan program dalam wilayah yang sama. Pendekatan sektoral masih tidak peduli dengan sektor lain. Program yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta kenyataannya kondisi ekonomi dan wilayah permukiman masih kumuh. Pemataan permukiman termasuk permukiman nelayan harus dipandang sebagai upaya dalam peningkatan kualitas kawasan fisik dan kesejahteraan masyarakat. Penataan tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang terpisah dengan pengelolaan potensi sumber daya terutama dalam mengenali dan menggali potensi lokal. Usaha menemukan karakter dan keunikannya akan memberi kontribusi dalam meningkatkan kualitas fisik dalam keseimbangan dengan lingkungan dan juga dapat mendorong masyarakat lokal (nelayan) dalam segi ekonomi. Degradasi kawasan, melemahnya lokal, menurunnya kualitas lingkungan, karakter permukiman nelayan yang menjadi identitas lokal sudah sulit untuk ditemukan, implementasi aktivitas nelayan sebagai rutinitas serta aktifitas budaya makin kabur.

Pendekatan Keterpaduan Pembangunan dan Rencana aksi green planning and design (*Action Plan*) berupa dokumen rencana terpadu penanganan kawasan pada permukiman kumuh nelayan yang khusus mencakup kegiatan fisik lingkungan, ekonomi sosial budaya dan pemberdayaan. Oleh karena itu diperlukan perencanaan dan pengelolaan terpadu sebagai alat yang terintegrasi melalui Action Plan Penataan Permukiman Nelayan Kumuh (APPPNK).

Tujuan penelitian ini menggali permasalahan di permukiman nelayan, menganalisis peringkat permasalahan, dan merumuskan model action plan penataan permukiman nelayan.

## **METODE**

Data diperoleh Focus Group Discussion (FGD), wawancara, observasi dan literatur. Data dianalisis dengan diksriptif kualitatif dan kuantitatif. Permasalahan permukiman nelayan diidentifikasi dilakukan oleh tiga variabel untuk analisis

prioritas masalah. Prioritas masalah, menggunakan metode USG ( urgency ,Seriousness,Growth ). Metode USG adalah salah satu cara untuk menetapkan urutan isu prioritas. Semakin tinggi tingkat USB semakin tinggi nilai untuk masing-masing elemen.

## HASIL

### 1. Permasalahan permukiman nelayan

Faktor-faktor permasalahan permukiman nelayan kumuh

Berdasarkan data yang diperoleh dari jurnal ,buku,diperoleh identifikasi permasalahan permukiman nelayan sebagai berikut : urbanisasi,institusi dan infrastruktur yang lemah, degradasi lingkungan, potensi lokal yang tidak terjaga, kekhasan/keunikan,karakter yang melemah,kualitas fisik menurun,polusi, keseimbangan dengan lingkungan tidak terjaga, populasi yang tinggi,kemiskinan ekonomi,sosial,budaya,kumuh,pembuangan limbah tidak ada,melemahnya budaya lokal,interaksi keruangan antara kawasan pesisir dan lingkungan tidak tercermin,degradasi kepemilikan,ketimpangan dalam hal pendapatan,kebijakan pembangunan tidak terpadu menimbulkan konflik antar sektor,tempat hunian yang berdesakan,luas rumah tidak sebanding dengan penghuni,rumah hanya berfungsi sekedar tempat istirahat dan melindungi diri dari panas ,angin dan hujan, lingkungan dan permukiman tidak teratur,bangunan sementara, tanpa perencanaan,prasanana kurang (MCK,Air bersih,Saluran pembuangan,Listrik, Gang lingkungan jorok dan menjadi sarang penyakit), fasilitas sosial sangat kurang,mata pencarian tidak tetap,usaha non formal,tanah bukan milik penghuni,pendidikan lemah,penghuni sering tidak tercatat sebagai warga setempat,rawan bencana,dan rawan penyakit.

Dari draft Panduan Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Direktorat Pengembangan Permukiman Dirjen Cipta Karya Kementerian PU (2014), penentuan kriteria kawasan permukiman kumuh dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek atau dimensi seperti tingkat kepadatan dan keteraturan bangunan, kualitas bangunan, kondisi sarana dan prasarana dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan dan tidak membahayakan penghuni, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal. Aspek dan kriteria kawasan permukiman kumuh seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Identifikasi Faktor-faktor Kekumuhan Berdasarkan Indikator Kumuh

Aspek	Kriteria
Kondisi Bangunan Hunian	Keterturan bangunan hunian Kepadatan bangunan hunian Kelayakan bangunan hunian
Kondisi Aksebilitas (Jalan Lingkungan)	Jangkauan jaringan jalan Kualitas jaringan jalan
Kondisi drainase	Kejadian genangan
Kondisi pelayanan air minum/baku	Kualitas sumber air minum/baku Kecukupan pelayanan air limbah
Kondisi pengelolaan air limbah	Prasarana sanitasi lingkungan
Kondisi pengelolaan persampahan	Pengelolaan persampahan lingkungan
Keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Action Plan

Sumber: Draft Pedoman Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Dirjen Cipta Karya-Kementerian PU (2014)

### 2. Analisis Peringkat Permasalahan Permukiman Nelayan Kumuh

Berikut hasil penelitian dari hasil Focus Group Discussion (FGD). Ada tujuh isu draf pedoman identifikasi permasalahan wawasan permukiman kumuh nelayan.

No.	Masalah	Urgency (U)	Seriousless (S)	Growth (G)	Score	Rangk
1.	Kondisi Bangunan Hunian	5	4	3	12	IV
2.	Kondisi Aksebilitas (Jalan Lingkungan)	5	4	2	11	V
3.	Kondisi drainase	4	3	2	9	VII
4.	Kondisi pelayanan air minum/baku	5	4	4	13	III
5.	Kondisi pengelolaan air limbah	5	5	4	14	II
6.	Kondisi pengelolaan persampahan	5	3	2	10	VI
7.	Keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	5	5	5	15	I

### Kondisi Bangunan Hunian

Permukiman pesisir adalah suatu lingkungan hunian yang terlatak di wilayah antara pertemuan daratan dan lautan yang didalamnya terdapat kegiatan penghidupan oleh kelompok pemukim tersebut yang dominan memanfaatkan potensi di wilayah pesisir dalam pemenuhan kebutuhan.

Lingkungan permukiman di kawasan pesisir pada umumnya merupakan kawasan kumuh dengan tingkat pelayanan akan pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana dasar lingkungan yang sangat terbatas, khususnya keterbatasan untuk memperoleh pelayanan sarana air bersih, drainase dan sanitasi,serta prasarana dan sarana untuk mendukung pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (Amir Mahmud, 2007). Menurut Satria (2004) dalam Ikhsani (2011), masyarakat pesisir adalah sekumpulan masyarakat yang hidup bersama-sama mendiami wilayah pesisir membentuk dan memiliki kebudayaan yang khas yang terkait dengan ketergantungannya pada pemanfaatan sumberdaya pesisir.

Kondisi bangunan dapat mempengaruhi kekumuhan suatu kawasan permukiman berdasarkan indikatornya yakni tingkat kualitas bangunan,tingkat kepadatan bangunan,tingkat kelayakan bangunan,dan tingkat penggunaan ruas lantai. Jika kondisi bangunan dikawasan permukiman buruk,dengan nilai sangat tinggi pada masing-masing indikator kekumuhan, maka aspek kondisi bangunan tersebut akan terindikasi sebagai faktor kekumuhan.

Tata letak bangunan tidak berpola salah satu syarat penataan permukiman.Kondisi tata letak bangunan yang tidak berpola merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dalam penerapan konsep revitalisasi/land sharing.Kepadatan bangunan juga merupakan syarat lain implementasi,revitalisasi/land sharing .

Dalam penerapan revitalisasi/land sharing dilaksanakan rekontruksi.Dapat disimpulkan bahwa kondisi fisik bangunan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam penataan permukiman nelayan.

### Kondisi Aksebilitas (Jalan Lingkungan)

Dalam perencanaan jalan diperlukan penentuan hirarki dan pola jalan yang tepat.Hirarki jalan berhubungan dengan lebar jalan. Semakin tinggi hirarkinya akan semakin lebar jalannya dan semakin rendah hirarkinya akan semakin sempit jalannya,artinya lebar jalan pada jalan arteri harus lebih besar dari pada lebar pada jalan lokal karena fungsinya yang berbeda.Pembagian hirarki jalan terdiri dari arteri primer,arteri sekunder,kolengtor primer,kolengtor sekunder,lokal primer, dan lokal sekunder.Penerapan pola jalan yang berbeda akan menghasilkan penataan kapling yang berbeda pula.Secara umum terdapat 4 pola jalan yaitu grid,curve,loop dan culdesac dimana masing-masing pola memiliki kelebihan dan kekurangannya.Misalnya,kelebihan pola jalan grid adalah dapat menciptakan bentuk kavling yang efisien,sehingga banyak diterapkan.Sedangkan kekurangannya adalah tidak tercapai privasi yang baik,karena merupakan jalan lintasan untuk lalu lintas kendaraan.Kelebihan jalan culdesac adalah terciptanya privasi yang tinggi karena terbatasnya akses lalu lintas,sehingga banyak diterapkan pada kawasan padang golf untuk menghindari akses kendaraan dan pejalan kaki ke lapangan golf.Sedangkan kekurangannya adalah akan menghasilkan kavling tusuk sate yang tidak disukai oleh konsumen,sehingga menyebabkan harga jual kavling relatif rendah.

### **Kondisi Sarana dan Prasarana**

Dalam identifikasi suatu kawasan permukiman kumuh terdapat aspek kondisi sarana dan prasarana yang harus diperhatikan. Dalam hal ini terdapat beberapa indikator yakni tingkat pelayanan air bersih, kondisi sanitasi lingkungan, kondisi persampahan, kondisi saluran air hujan dan kondisi jalan. Melalui indikator-indikator tersebut dapat ditentukan kekumuhan suatu kawasan permukiman dengan pemberian nilai pada tiap-tiap indikator kekumuhan.

Kondisi Drainase di kawasan permukiman juga tergolong sangat tinggi untuk indikator kekumuhan. Karakter lokal masyarakat yang dari dulunya hidup di atas laut tentunya tidak terikat dengan ada atau tidaknya fasilitas drainase, sehingga aspek drainase tersebut tidak terlalu diperhatikan. Kurangnya drainase bahkan tidak tersedianya drainase di kawasan permukiman bukanlah hal yang serius bagi mereka karena intensitas banjir juga sangat rendah untuk kawasan permukiman ini dan berdasarkan persepsi masyarakat, untuk hidup di atas laut tidak memerlukan adanya drainase.

### **Kondisi Sosial Ekonomi**

Tingkat rendahnya kondisi sosial ekonomi dapat mempengaruhi kondisi kekumuhan suatu kawasan permukiman. Tingkat kemiskinan, tingkat kependidikan, tingkat pendapatan merupakan indikator yang terdapat pada aspek kondisi sosial ekonomi. Kondisi sosial masyarakat akan menentukan kualitas dari suatu kawasan permukiman.

### **Keterpaduan Pelaksanaan Program**

Pengelolaan kawasan pantai di Indonesia sejauh ini terfokus pada implementasi kebijakan dan peraturan yang berlaku. Kebijakan konservasi pantai dan pengelolaan kawasan pantai terpadu dilaksanakan dengan memperhatikan (1) wilayah pesisir (2) kemauan politik pemerintah terhadap isu lingkungan (3) kelembagaan yang terkait dalam mengelola sumber daya pesisir (4) partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan pesisir.

Tujuan penelitian di Indonesia adalah untuk mencapai keberlanjutan pembangunan. Namun, setelah meninjau elemen utama dalam kebijakan konservasi kawasan pesisir, ternyata bahwa kebijakan tersebut cukup sulit dilaksanakan.

Di Indonesia, ekosistem kawasan pesisir memiliki peran strategis dan prospek yang cerah bagi nasional pengembangan. Namun, saat ini pengembangan sumber daya di Indonesia masih belum optimal dan berkelanjutan. Alasan utama untuk ini adalah bahwa perencanaan dan pelaksanaan pengembangan sumber daya kawasan pesisir masih bersifat sektoral. Setiap sektor dikembangkan tanpa memperhatikan sektor terkait lainnya. Selain itu, pendekatan sektoral pada umumnya tidak peduli dengan dampak pembangunan di sektor lain. Mereka dapat mematikan sektor bisnis lainnya. Perencanaan dan pelaksanaan sumber daya pesisir berkelanjutan yang tidak dilaksanakan secara terpadu akan merusak sumber daya karena karakteristik dan dinamika ekosistem kawasan pesisir secara ekologis saling berkaitan. Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan kawasan pesisir berkelanjutan yang sesuai dengan ekosistem yang ada, dibutuhkan perumusan pengembangan metode pengelolaan kelautan dan kawasan pesisir tertentu. Dalam hal ini pengelolaan kawasan pesisir terpadu (terintegrasi) merupakan hal yang penting.

### **3. Perumusan Model Action Plan**

Rencana aksi (Action Plan) adalah suatu rencana kegiatan yang lebih terperinci untuk menerjemahkan strategi-strategi dan arahan pembangunan yang telah diindikasikan dalam rencana strategi, rencana zonasi, dan rencana pengelolaan ke dalam program-program atau proyek pembangunan di wilayah pesisir dan laut.

Peringkat sederhana "Action Plan" dapat membantu menentukan langkah-langkah penting mulai dari perencanaan sampai ke Aksi. Saat merencanakan pelaksanaan program ditingkat daerah, "Daftar Periksa" dapat digunakan sebagai perangkat untuk mengidentifikasi tindakan-tindakan yang diperlukan, menentukan prioritas, dan menentukan tujuan. Setelah rencana disepakati, pastikan aturan pelaksanaannya jelas. Caranya dengan mengisi dan melengkapi matriks "Action Plan" bersama dengan orang-orang yang akan terlibat. Agar "Action Plan" digunakan secara tepat, beberapa hal berikut penting diperhatikan :

- a. Tujuan menguraikan secara jelas dan transparan yang ingin dicapai oleh seluruh pemangku kepentingan disarankan menggunakan "Daftar Periksa" dan merujuk pada tujuan seperti yang tercantum di setiap komponen utama

- b. Aksi menguraikan tindakan-tindakan yang akan dilaksanakan. Dalam menggunakan “Daftar Periksa” yang perlu dilakukan adalah mengisi dan memperhatikan pernyataan-pernyataan di setiap komponen utama dan kemudian menerjemahkannya ke dalam bentuk kegiatan.

Langkah-langkah penyusunan Action Plan :

- a. Identifikasi dan analisis potensi, isu dan permasalahannya
- b. Identifikasi dan analisis stakeholders
- c. Menyusun draf Rencana Aksi
- d. Kaji awal bersama stakeholder terbatas
- e. Revisi draf rencana
- f. Konsultasi publik hasil revisi
- g. Penyelesaian dan pengesahan Action Plan

Muatan Action Plan

- a. Latar belakang dan tujuan
- b. Wilayah geografi
- c. Proses penyusunan rencana
- d. Partisipasi
- e. Program kerja
- f. Kaji ulang kinerja
- g. Pendekatan Program
- h. Kegiatan

## **KESIMPULAN**

Konsep penataan permukiman nelayan kumuh harus memperhatikan faktor – faktor kekumuhan. Pembangunan berkelanjutan sebagai visi pembangunan, yang berupaya menghadirkan kesejahteraan yang berkeadilan`

Peringkat Permasalahan Permukiman Nelayan Kumuh adalah 1) Keterpaduan 2) Kondisi pengelolaan air limbah 3) .Kondisi pelayanan air minum/baku 4) Kondisi bangunan hunian 5) Kondisi aksesibilitas (jalan lingkungan) 6) Kondisi pengelolaan persampahan 7) Kondisi drainase.

Perangkat “Action Plan” merupakan perumusan pengembangan metode pengelolaan kelautan dan kawasan pesisir.

## **REFERENSI**

Harsuko Riniwati Blue Economy In Motion: Enabling Community Action (ENACT) Model for Resilient Coastal Village Development

Dhea M. Damisi1, Veronica A. Kumurur2 & Rieneke L.E. Sela.(2014). Analisis Faktor-Faktor Kekumuhan Kawasan Permukiman Pesisir Tradisional (Studi Kasus : Desa Bajo Kecamatan Tilmuta, Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo)

Syahrizal, Sri Meiyenti dan Rinaldi Ekaputra.(2011). Aspek Tindakan Dan Perilaku Dalam Kemiskinan : Studi Pada Masyarakat Nelayan Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat

Satriya Wahyu Firmandhani, Bambang Setioko, Erni Setyowati.(2013). Faktor Pembentuk Persepsi Ruang Komunal Di Permukiman Nelayan (Studi Kasus: Pemukiman Nelayan Tambak Mulyo Semarang)

Rivina Yukeiko dan Dian Rahmawati ST. MT.(2015) Konsep Land Sharing Sebagai Alternatif Penataan Permukiman Nelayan di Kelurahan Gunung Anyar Tambak Surabaya

Pingkan Peggy Egam dan Michael Moldi Rengkung Analisis Visual Kawasan Pesisir Pantai (Studi Kasus Permukiman Masyarakat LOS di Pesisir Pantai Malalayang)

Ratna Darmiwati.(2001).Perencanaan Permukiman Nelayan Di Pantai Timur Surabaya

Fadli Irsayad dan Delvi Yanti.(2016).Evaluasi Tekno-Ekonomi Pemanfaatan Bio Gas Skala Rumah Tangga Sebagai Sumber Energi Alternatif Ramah Lingkungan

Ni Ketut Sari Adnyani.(2016).Manajemen Tata Kelola Lingkungan Dengan Model Simulasi Terpadu Perlindungan Hukum Kawasan Pesisir Nusa Penida ( Pelibatan Elite Desa Adat Sebagai Equilibrium)

Nandi.(2014). Coastal Conservation Policies And Integrated Coastal Zone Management (ICZM) In Indonesia